

**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM ISLAM (KAJIAN ONTOLOGIS,
EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister
pada Prodi Hukum Keluarga**



**Oleh
FARID NURUL HADI
2320040017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2026M/1448H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID NURUL HADI

NIM : 2320040017

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, bahwa dalam penelitian saya yang berjudul **“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 6 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



FARID NURUL HADI
NIM. 2320040017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Analisis Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)” telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

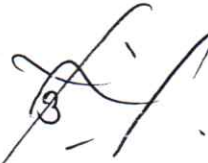
Padang, 18 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Elfia., M.Ag
NIP. 19790317 200501 2006



Dr. Yusnita Eva., S.Ag., M.Hum
NIP. 19750403 200212 2001

HALAMAN PENGESAHAN

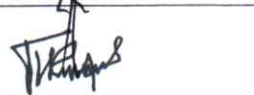
Naskah Tesis dengan judul **“Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”** yang disusun oleh **FARID NURUL HADI NIM 2320040017**, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah pada tanggal 6 Juli 2026

Disahkan di : Padang
Tanggal : 6 Juli 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

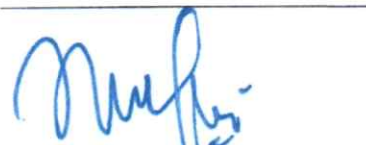
Prof. Dr. Zulfan, SHI., MH
Penguji I / Ketua



Dr. Mufti Ulil Amri, MA
Penguji II / Sekretaris



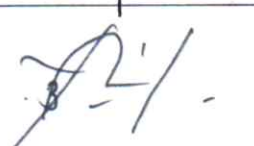
Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
Penguji III



Dr. Aulia Rahmat, SHI., MH
Penguji IV



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
Penguji V / Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
Penguji VI / Pembimbing II



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph. D
NIP. 197112011996031002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

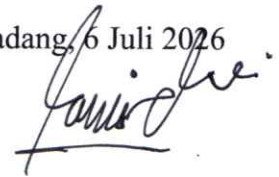
Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).”** Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah mencerdaskan peradaban islam.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) program Strata Dua (S.2) pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak tertingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda Benni Hartofik dan ibunda Rini Mulyani dan keluarga besar pihak ayahanda dan ibunda yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan yang diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan tesis ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. dan Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag, serta Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D, dan seluruh jajarannya;
2. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph. D, Wakil Direktur Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag, dan Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Bapak Prof. Dr. Zulfan, S.HI., MH yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
3. Pembimbing I penulis, Ibu Prof. Dr, Elfia, M.Ag dan Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, yang selalu membimbing dengan sabar dan penuh perhatian kepada penulis selama penulisan tesis ini.

4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Prodi Magister Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, didalam dan diluar bangku perkuliahan;
5. Akhirnya penulis memohon kepada Allah Ta'ala agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap wajah dan ridho-Nya, serta menjadikan tulisan ini sebagai amalan jariyah yang dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 6 Juli 2026



FARID NURUL HADI
NIM. 2320040017

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID NURUL HADI

Nim : 2320040017

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : “Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam
(Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Padang, 6 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



FARID NURUL HADI
NIM. 2320040017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan nomor : 0543/u/1987,

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	B	-
3.	ت	T	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	J	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah
7.	خ	Kh	-
8.	د	D	-
9.	ذ	Ẓ	z dengan titik di atas
10.	ر	R	-
11.	ز	Z	-
12.	ش	S	-
13.	س	Sy	-
14.	ص	ṣ	s dengan titik di bawah
15.	ض	ḍ	-

No	Arab	Latin	Keterangan
16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
18.	ع	‘	-
19.	غ	G	-
20.	ف	F	-
21.	ق	Q	-
22.	ك	K	-
23.	ل	L	-
24.	م	M	-
25.	ن	N	-
26.	و	W	-
27.	ه	H	-
28.	ء	’	apostrof
29.	ي	Y	-

2. Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يُذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

ا	=	Ā	كان	Kāna
اي	=	ī	سقى	sīqa
أو	=	U	كونوا	Kunu

4. Diftong

ا	=	Ā	كان	Kāna
اي	=	ī	سقى	sīqa
أو	=	U	كونوا	Kunu

5. Syiddah ditulis dengan rangkap

Contoh: ربنا ditulis rabbanā

6. Alif lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al. Contoh: الكافرون ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

الرجال ditulis ar-rijāl

7. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h. Contoh:

البقرة ditulis al-Baqarah Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:

المال زكاة ditulis zakāt al-māl

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **“Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”**, yang disusun oleh Farid Nurul Hadi. NIM 2320040017. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara legalitas formal pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional dengan praktik perkawinan yang tidak dicatat (nikah siri) yang masih berlangsung di masyarakat. Pada sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, perlindungan anak, hubungan nasab, serta relasi antara hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat, dasar legitimasi, dan nilai kemanfaatan pencatatan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam melalui analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan paradigma filsafat hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur filsafat hukum Islam, serta berbagai karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur pembentuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam, melainkan institusi hukum yang menghubungkan eksistensi religius perkawinan dengan eksistensi yuridisnya dalam sistem hukum negara. Secara epistemologis, legitimasi hukum pencatatan perkawinan tidak bertumpu pada perintah tekstual yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan dibangun melalui proses ijtihad yang berlandaskan *maqashid al-syar'ah*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Secara aksiologis, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta sebagai sarana mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariat, hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern yang selaras dengan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-maṣalih*.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Filsafat Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This thesis is titled **“Marriage Registration from the Perspective of Islamic Legal Philosophy (An Ontological, Epistemological, and Axiological Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010),”** authored by Farid Nurul Hadi, Student ID 2320040017. This research is motivated by the gap between the formal legality of marriage registration in the national legal system and the practice of unregistered marriages (nikah siri) that still persists in society. On the other hand, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has expanded the civil relationship between a child born out of wedlock and his or her biological father, thereby sparking debate regarding the status of marriage registration, child protection, lineage, and the relationship between Islamic law and state law. This study aims to examine the nature, basis of legitimacy, and value of marriage registration from the perspective of Islamic legal philosophy through ontological, epistemological, and axiological analyses of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study is a normative legal study based on the paradigm of Islamic legal philosophy. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, including legislation, Constitutional Court decisions, literature on Islamic legal philosophy, and various relevant scholarly works. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach based on the ontological, epistemological, and axiological frameworks of Islamic law. The results indicate that, ontologically, marriage registration is not a constitutive element of a valid marriage under Islamic law; rather, it is a legal institution that links the religious existence of marriage to its legal existence within the state’s legal system. Epistemologically, the legal legitimacy of marriage registration does not rest on explicit textual commands in the Qur’an and Hadith, but is established through a process of *ijtihad* grounded in *maqashid al-shar’ah* and *maṣlaḥah mursalah*. From an axiological perspective, marriage registration serves a strategic function as an instrument of legal protection for women and children, as well as a means of realizing justice, public interest, and legal certainty. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 demonstrates an effort to harmonize Sharia values, human rights, scientific advancements, and the need for legal protection in modern society—in accordance with the principle of *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-maṣaliḥ*.

Keywords: Marriage Registration, Philosophy of Islamic Law, Constitutional Court Decision

الخلاصة

تحمل هذه الأطروحة عنوان "تسجيل الزواج من منظور فلسفة القانون الإسلامي (دراسة أنطولوجية وإبستمولوجية وأكسيولوجية لقرار المحكمة الدستورية رقم 2320040017 PUU-VIII/2010/46)"، وقد أعدها فريد نورول هادي. رقم الطالب 2320040017. تستند هذه الدراسة إلى وجود فجوة بين الشرعية الشكلية لتسجيل الزواج في النظام القانوني الوطني وممارسة الزواج غير المسجل (الزواج السري) التي لا تزال سائدة في المجتمع. من ناحية أخرى، فقد وسّع قرار المحكمة الدستورية رقم 2320040017 نطاق العلاقة المدنية بين الطفل المولود خارج إطار الزواج ووالده البيولوجي، مما أثار جدلاً حول مكانة تسجيل الزواج، وحماية الطفل، وعلاقة النسب، والعلاقة بين الشريعة الإسلامية وقانون الدولة. يهدف هذا البحث إلى دراسة جوهر تسجيل الزواج وأسس شرعيته وقيمه المفيدة من منظور فلسفة القانون الإسلامي، من خلال تحليل وجودي ومعرفي وأخلاقي لقرار المحكمة الدستورية رقم 2320040017 PUU-VIII/2010/46. ويُعد هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً يستند إلى نموذج فلسفة القانون الإسلامي. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة المراجع القانونية الأولية والثانوية والثالثة، والتي تشمل التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية، وأدبيات فلسفة القانون الإسلامي، بالإضافة إلى مختلف الأعمال العلمية ذات الصلة. أُجري تحليل البيانات بطريقة وصفية-تحليلية باستخدام إطار عمل الوجودية، وعلم المعرفة، وعلم القيم في القانون الإسلامي. أظهرت نتائج البحث أنه من الناحية الوجودية، لا يُعد تسجيل الزواج عنصراً مكوناً لصحة الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية، بل هو مؤسسة قانونية تربط بين الوجود الديني للزواج ووجوده القانوني في النظام القانوني للدولة. من الناحية المعرفية، لا تستند شرعية تسجيل الزواج إلى أمر نصي صريح في القرآن الكريم والحديث النبوي، بل تُبنى من خلال عملية الاجتهاد القائمة على مقاصد الشريعة والمصلحة المرسلة. من الناحية القيمية، يؤدي تسجيل الزواج وظيفة استراتيجية باعتباره أداة للحماية القانونية للمرأة والطفل، ووسيلة لتحقيق العدالة والمصلحة واليقين القانوني. ويُظهر قرار المحكمة الدستورية رقم 2320040017 PUU-VIII/2010/46 وجود جهود للتوفيق بين قيم الشريعة وحقوق الإنسان وتطور العلوم والحاجة إلى الحماية القانونية في المجتمع الحديث، بما يتوافق مع مبدأ: درء المفسّدت مقدم على جلب المصالح.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORI DAN LITERATUR REVIEW.....	7
2.1. Konsep Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Positif	7
2.1.1. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	11
2.1.2. Landasan Hukum Perkawinan dan Perceraian.....	14
2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan dan Perceraian	16
2.2. Konsep dan Landasan Normatif Pencatatan Perkawinan	19
2.3. Konsep dan Objek Kajian Filsafat Hukum Islam	24
2.4. Literatur Review.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Jenis Penelitian	59
3.2. Sumber Data	60
3.3. Teknik Pengumpulan Data	61
3.4. Teknik Analisis Data	62
BAB IV ANALISIS ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010	63
4.1. Analisis Ontologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	63
4.2. Analisis Epistemologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	86

4.3. Analisis Aksiologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	101
--	-----

BAB V PENUTUP.....108

5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP